

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Aksesibilitas Informasi

Aksesibilitas berasal dari kata akses atau jalan masuk. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No 98 Tahun 2017, aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk pengguna jasa berkebutuhan khusus guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Sejalan dengan itu, Sheth & Sisodia (2012) mendefinisikan aksesibilitas dalam konteks pelayanan publik yaitu sejauh mana pelanggan dapat dengan mudah memperoleh dan menggunakan produk. Adapun asas-asas aksesibilitas di ruang publik yaitu keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian (Permen PUPR Nomor 30/PRT/M/2006, 2006). Kesimpulannya, aksesibilitas merujuk pada kemudahan yang dirasakan individu, seseorang, atau pengguna dalam mengakses, memperoleh, atau menjangkau sesuatu.

Informasi merupakan sekumpulan data, menurut Lasa (2009) informasi didefinisikan sebagai suatu berita, peristiwa, data, maupun literatur. Sutarman (2009) menambahkan bahwa definisi informasi adalah sekumpulan fakta (data) yang diorganisasikan dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima. Menurut Suwarno (2010) informasi merupakan konten dari berbagai format, baik tertulis atau tercetak, tersimpan dalam database, atau terkumpul dalam suatu internet. Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa informasi

adalah sekumpulan fakta dan data yang telah diolah, kemudian menjadi berguna. Maka, aksesibilitas informasi dapat diartikan sebagai kemudahan bagi individu untuk mengakses, memperoleh, atau menjangkau informasi yang tersedia.

Aksesibilitas informasi dalam konteks perpustakaan mencakup format dan layanan informasi yang dapat diakses (Hill, 2013). Aksesibilitas informasi memudahkan pengguna untuk menelusuri dan memperoleh informasi. Menurut ALA atau American Library Association (2022) aksesibilitas informasi dilihat sebagai kemampuan untuk mengakses dan mendapatkan manfaat dari informasi. Hal tersebut mencakup kemampuan individu dalam mencari, memperoleh, dan menggunakan informasi tanpa terhambat oleh berbagai kendala, sehingga memungkinkan akses yang efektif terhadap informasi, Koerniawan, dkk (2024) berpendapat bahwa kemudahan akses informasi berarti informasi harus tersedia dalam format yang mudah diakses oleh individu yang memerlukannya, tanpa adanya hambatan yang tidak perlu. Pemanfaatan media yang sesuai dengan kemampuan pengguna serta pemanfaatan bantuan teknologi juga memudahkan pengguna untuk memahami informasi (Miftah, 2014).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas aksesibilitas informasi tidak hanya sebatas kemampuan pengguna, namun juga menyediakan format yang tepat dan sesuai dengan kemampuan pengguna. Menurut Mutia (2023) aksesibilitas informasi mencakup bagaimana informasi dapat dengan mudah dikelompokkan, diorganisir, dibagikan, dan dilayankan kepada orang lain. Ketepatan penggunaan media informasi dapat memudahkan pengelolaan informasi yang nantinya juga memberikan kemudahan individu dalam mengakses informasi. Penggunaan media

yang sesuai dengan kemampuan pengguna dalam pengoperasiannya akan mendorong mereka untuk memanfaatkan media tersebut untuk mengakses informasi yang diinginkan. Dengan demikian, kemudahan akses informasi memainkan peran penting dalam memastikan bahwa informasi dapat diakses secara efisien dan efektif, serta memberikan manfaat bagi pengakses informasi tersebut.

2.1.2 Perpustakaan Daerah

Perpustakaan merupakan gedung yang menyimpan kumpulan informasi dan pengetahuan. Menurut Sutarno (2006) perpustakaan adalah ruang, bagian dari bangunan, atau gedung itu sendiri yang menampung koleksi buku. Buku-buku ini disusun dan diatur sehingga pembaca dapat dengan mudah menemukan dan menggunakannya jika diperlukan. Sejalan dengan pengertian tersebut Anwar, dkk (2019) menyebutkan perpustakaan adalah suatu unit kerja yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi bahan pustaka yang disusun secara sistematis dan tersedia untuk diakses oleh pengguna sebagai sumber informasi.

Perkembangan perpustakaan menciptakan dua jenis perpustakaan yaitu perpustakaan umum dan khusus. Perpustakaan yang mudah dan sering kita jumpai merupakan perpustakaan umum. Basuki (1993) menjelaskan perpustakaan umum sebagai perpustakaan yang terselenggara menggunakan dana umum untuk kepentingan masyarakat luas. Perpustakaan daerah termasuk kedalam jenis perpustakaan umum karena menyediakan beragam macam koleksi yang dibutuhkan oleh pengguna luas (masyarakat) serta anggarannya dibiayai pajak negara. Perpustakaan daerah berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian dan perpustakaan

pelestarian yang berkedudukan di kabupaten/kota (Perpusnas, 2017). Menurut Undang-Undang Nomor 43 Pasal 8 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah. Perpustakaan bertugas sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang perpustakaan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Berdasarkan penjeleasan diatas dapat diartikan bahwa perpustakaan daerah merupakan perpustakaan yang dikelola oleh pemerintah dengan tujuan sebagai unsur pelaksana pemerintah dibidang perpustakaan serta memberikan akses informasi kepada pengguna (masyarakat).

Perpustakaan daerah bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan ketertarikan membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (UU No. 43 Tahun 2007). Upaya tersebut dilakukan perpustakaan dengan cara menyediakan bacaan atau informasi yang beragam kepada pengguna atau masyarakat luas. Menurut Suwarno (2009) ada beberapa fungsi perpustakaan yaitu sebagai wahana penyimpanan, pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi. Fungsi-fungsi tersebut bermanfaat dalam meningkatkan, mencerdaskan, serta memberdayakan bangsa dan negara.

1) Fungsi Penyimpanan

Perpustakaan bertugas menghimpun buku atau koleksi yang dimiliki.

Perpustakaan mengumpulkan, mengolah, dan menghimpun semua koleksi yang dimiliki dengan tujuan untuk dilayankan kepada para pemustaka.

2) Fungsi Pendidikan

Perpustakaan memberikan ruang belajar untuk publik. Perpustakaan menyediakan beragam koleksi yang menyimpan berbagai ilmu pengetahuan. Koleksi tersebut dapat dimanfaatkan bagi mereka yang tidak lagi berada di bangku sekolah. Sehingga masyarakat dapat mendapatkan akses pendidikan melalui bacaan atau koleksi di perpustakaan.

3) Fungsi Penelitian

Perpustakaan bertugas menyediakan koleksi yang mendukung kepentingan penelitian. Selain itu, perpustakaan juga bertugas menyediakan jasa layanan informasi yang dapat membantu keberlangsungan suatu penelitian.

4) Fungsi Pelestarian

Perpustakaan bertugas menyimpan serta melestarikan khazanah budaya bangsa, karya tulis komunitas, dan mengapresiasi budaya melalui proses penyediaan dan pelestarian koleksi. Pelestarian koleksi pustaka bertujuan agar informasi atau pengetahuan yang terkandung dapat dilindungi dan bertahan dalam kurun waktu yang lama.

5) Fungsi Informasi

Perpustakaan menyediakan berbagai macam informasi dan pengetahuan. Perpustakaan menyediakan informasi yang hanya dibutuhkan pemustaka berupa jasa layanan informasi. Pemberian layanan informasi tersebut dapat dilakukan baik atas permintaan maupun tidak.

6) Fungsi Rekreasi

Fungsi rekreasi merupakan pelengkap fungsi-fungsi yang ada di perpustakaan. Perpustakaan melalui koleksi ataupun fasilitasnya dapat memberikan sarana hiburan yang menarik dan memberikan kenyamanan.

Berdasarkan fungsi-fungsi diatas, perpustakaan memiliki peran utama dalam hal pemberian akses informasi dan pemenuhan kebutuhan informasi pengguna. Tujuan dan fungsi perpustakaan dicapai untuk memaksimalkan peran perpustakaan sebagai lembaga penyedia sumber informasi. Keberadaan perpustakaan tentu sangat dibutuhkan di era globalisasi. Semakin cepatnya pertukaran dan mudahnya akses ke informasi menuntut adanya perkembangan pada layanan perpustakaan. Keberadaan perpustakaan tidak lagi hanya sebatas sumber penyedia informasi. Perpustakaan harus dinamis dalam mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, peran perpustakaan juga harus dikembangkan salah satunya dengan memberikan layanan inklusif yang bertujuan memberdayakan masyarakat.

2.1.3 Layanan Perpustakaan Ramah Difabel Netra

Difabel merupakan istilah dari penyandang disabilitas, mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang masih memperoleh peminggiran dan stigma negatif dalam pemenuhan hak mereka di ruang publik (Surwanti, dkk, 2021). Penyandang berasal dari kata dasar sandang yang berarti merujuk kepada individu yang memiliki (menyandang) sesuatu, sedangkan disabilitas berasal dari kata *disability* atau *disabilities* (dalam bahasa Inggris) yang menggambarkan keterbatasan kemampuan mental dan fisik seseorang. Menurut Maxwell (1995) difabel adalah kondisi atau kelainan baik fisik atau mental yang mengganggu kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas secara mandiri.

Terdapat beberapa ragam disabilitas salah satunya difabel netra, yaitu seseorang atau individu yang mempunyai keterbatasan penglihatan, sehingga saluran tersebut tidak berfungsi dalam menerima informasi (Aziz, 2016). Dapat diartikan bahwa difabel netra merupakan seseorang dengan kondisi penglihatan lemah yang mengandalkan indera lain untuk memperoleh informasi. Keterbatasan tersebut menghambat difabel netra untuk mendapatkan hak atas informasi. Namun, perpustakaan menjamin hak tersebut melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 yang berbunyi masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. Penyediaan layanan perpustakaan kepada pengguna difabel harus menggunakan pendekatan layanan inklusif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka (ALA, 2009).

Layanan perpustakaan inklusif berupaya memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk berkarya, melihat keragaman budaya, dan menerima perubahan untuk membantu masyarakat mengembangkan potensinya (Kurniasih & Saefullah, 2021). Menurut Diana (2022) perpustakaan berfungsi menjadi wadah pembelajaran sepanjang hayat bagi setiap individu atau masyarakat untuk memfasilitasi kebutuhan penggunanya serta berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Layanan perpustakaan inklusif berperan memastikan dan menyediakan akses, layanan, serta lingkungan yang ramah bagi semua masyarakat salah satunya kemudahan akses informasi.

Difabel corner merupakan salah satu layanan perpustakaan inklusif yang membantu meningkatkan aksesibilitas informasi pengguna difabel. Layanan tersebut mengupayakan pengguna difabel memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses informasi dan layanan (Asari, dkk, 2022). Lebih dari itu, perpustakaan dapat memfasilitasi tempat atau ruang (*makerspace*) bagi difabel untuk berkarya dan berkegiatan (Mahdi, 2020). Perpustakaan memastikan kesamaan hak kepada seluruh masyarakat dalam mengakses layanan dan fasilitas di perpustakaan. Hak tersebut meliputi hak terhadap akses sumber informasi dan hak berkegiatan di perpustakaan. Salah satu contoh kesamaan hak yang dapat diperoleh seperti perpustakaan dapat menyediakan layanan baca untuk tunanetra atau mereka yang kesulitan dalam membaca. Pengguna diberikan kemudahan dalam mengakses sumber daya yang ada di perpustakaan baik informasi, layanan, maupun fasilitas.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Aksesibilitas disini lebih mengedepankan kebutuhan pemustaka agar sumber daya yang ada di perpustakaan dapat dimanfaatkan secara optimal. Maka dari itu, menurut IFLA atau International Federation of Library Associations and Institutions (2005) guna memberikan layanan informasi yang baik kepada pengguna difabel netra, perpustakaan harus menyediakan informasi dalam cetakan besar, informasi dalam huruf braille, informasi dalam bentuk digital, dan informasi dalam bentuk audio, CD/DVD, atau dalam format DAISY. ALA (2022) menambahkan teknologi bantu dalam mengakses informasi yaitu komputer

pembaca layar, monitor besar, teks alternatif, dan teks kontras tinggi. Berikut merupakan tabel informasi yang dikategorikan berdasarkan jenis disabilitas:

Tabel 2.1 Format Informasi berdasarkan Kelompok Difabel

Kelompok Difabel	Cetakan besar	Kaset/DAISY CD/DVD	Braille	Website	Video dengan teks	Telepon teks	Mudah dibaca
Difabel Netra	X	X	X	X			
Difabel Rungu				X	X	X	X
Kesulitan Membaca	X	X		X			X
Difabel Fisik		X		X			
Difabel Kognitif		X		X			X

Sumber: IFLA (2005)

Aziz (2016) menambahkan perlu adanya penggunaan teknologi atau alat bantu yang memudahkan pengguna difabel netra mengakses informasi di perpustakaan contohnya komputer dengan program JAWS, *printer braille*, *open book scanner*, *talking book*, pemutar DAISY, termoform, telesensory.

Selain penyediaan layanan dan fasilitas, pustakawan harus bisa mengatasi hambatan fisik dan juga hambatan psikologis pengguna difabel untuk datang ke perpustakaan dan mengomunikasikan kebutuhan mereka (IFLA, 2005). Pustakawan harus diberikan pelatihan guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kebutuhan difabel yang beragam. Melalui pelatihan tersebut, pustakawan dapat memberikan pendampingan dan pelayanan pendidikan pemakai agar pengguna difabel dapat memanfaatkan perpustakaan secara optimal (Aziz, 2016). Perpustakaan dapat menyediakan layanan khusus dan inklusif bagi pengguna difabel seperti layanan pengantaran, layanan penjangkauan, layanan

membaca, dan konsultasi terjadwal (IFLA, 2005). Adapun lima aspek yang dapat menciptakan kualitas layanan inklusif guna memenuhi kebutuhan pengguna difabel di perpustakaan yaitu *accessibility*, *responsiveness*, *courtesy*, *competence*, dan *security* (Maryani, dkk, 2018).

Melalui layanan yang berorientasi kepada kelompok difabel, perpustakaan berupaya memperhatikan kebutuhan dan kepentingan kelompok mereka yang sering menghadapi hambatan dan diskriminasi dalam mengakses informasi. Pendekatan inklusif disini penting untuk memastikan bahwa masyarakat tidak terpinggirkan dari kesempatan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan. Perpustakaan berkomitmen untuk memastikan bahwa masyarakat difabel memiliki kesamaan hak dalam mengakses sumber daya informasi dan bahan bacaan yang sesuai. Perpustakaan dapat menyediakan layanan yang berorientasi memberdayakan masyarakat, memberikan hak layanan yang sama, dan kemudahan akses informasi. Melalui upaya-upaya tersebut perpustakaan dapat memastikan bahwa inklusi sosial menjadi tujuan yang ingin dicapai. Perpustakaan dapat memastikan kebutuhan dan akses terhadap informasi menjadi hak yang sama tidak hanya bagi pengguna difabel namun juga semua anggota masyarakat.

2.2 Penelitian Sejenis Sebelumnya

Untuk melengkapi keutuhan penelitian maka dibutuhkan penelitian sejenis sebagai bahan acuan, pedoman, dan referensi dalam memenuhi data penelitian. Maka dari itu, peneliti mengumpulkan beberapa referensi penelitian sejenis yang dapat dijadikan penilaian dan pembandingan agar mengetahui adanya *gap* penelitian serta

menunjukkan orisinalitas penelitian yang sedang dilakukan. Adapun penelitian sejenis sebelumnya yang membahas terkait program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Peneliti menemukan literatur-literatur terkait yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi pada penelitian, antara lain:

Penelitian pertama berjudul “Assistive Technology to Enhance Access to Information for Student with Disabilities a Case Study in Surabaya” (Mutia & Cahyani, 2021). Penelitian tersebut bertujuan menganalisis akses informasi yang mendukung keterbatasan penglihatan mahasiswa tunanetra dalam melakukan kegiatan pembelajaran di universitas. Metode penelitian yang digunakan Mutia & Cahyani (2021) adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan tinjauan pustaka. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa teknologi bantu seperti telepon genggam, laptop, pemindai, dan alat perekam telah mendukung proses pembelajaran. Teknologi tersebut membantu mahasiswa difabel dalam memahami dan memperoleh informasi secara mudah, akurat, serta cepat, sehingga mereka lebih mudah untuk berbagi informasi dengan teman lainnya.

Penelitian yang dilakukan Mutia & Cahyani (2021) memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu mengkaji tentang kemudahan akses informasi yang dialami oleh kelompok difabel netra. Perbedaan terdapat pada fokus kajian penelitian yang dilakukan Mutia & Cahyani (2021) yaitu mengkaji tentang bagaimana mahasiswa difabel mendapatkan akses informasi untuk mendukung proses pembelajaran melalui bantuan teknologi. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pengalaman aksesibilitas informasi pengguna difabel dalam memenuhi kebutuhan informasi mereka di perpustakaan umum.

Penelitian kedua berjudul “Disabilitas Netra dalam Berliterasi Informasi” (Adiba, dkk, 2019). Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi difabel netra melalui buku braille dan buku digital yang diharapkan menjadi media informasi bagi kelompok tunanetra. Metode penelitian yang digunakan Adiba, dkk (2019) adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data adalah observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpustakaan membantu masyarakat difabel netra dalam mengakses informasi melalui buku braille dan buku digital. Perpustakaan tidak hanya memfasilitasi kebutuhan informasi masyarakat difabel, tetapi juga memberikan hak yang sama dalam mengakses informasi.

Penelitian yang dilakukan Adiba, dkk (2019) memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu mengkaji tentang pengalaman akses informasi pengguna difabel netra di perpustakaan umum. Perbedaan penelitian yang dilakukan Adiba, dkk (2019) terdapat pada fokus kajian, dimana penelitian Adiba, dkk (2019) mengkaji bagaimana perpustakaan memberikan akses dan layanan informasi melalui buku braille dan buku digital dalam meningkatkan literasi informasi kelompok difabel netra. Adapun pada penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pengalaman aksesibilitas informasi pengguna difabel netra dalam memenuhi kebutuhan informasi mereka di perpustakaan umum.

Penelitian ketiga berjudul “Evaluasi Layanan Difabel Tunanetra di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman” (Rahmawati & Prabowo, 2019). Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi layanan perpustakaan bagi pengguna difabel di Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman dengan menilai

tiga komponen standar layanan yang dikeluarkan oleh IFLA. Metode penelitian yang digunakan Rahmawati & Prabowo (2019) adalah metode kualitatif dengan teknik pengambilan data dilakukan wawancara terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman memiliki *braille corner* untuk pengguna difabel netra. Namun, keberadaan layanan tersebut belum dikelola dengan optimal, sehingga pengguna difabel netra belum bisa memanfaatkannya secara maksimal.

Penelitian yang dilakukan Rahawati & Prabowo (2019) memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu menganalisis tentang layanan perpustakaan yang memberikan kemudahan akses informasi bagi pengguna difabel. Perbedaan penelitian yang dilakukan Rahmawati & Prabowo (2019) terdapat pada fokus penelitian, dimana penelitian Rahmawati & Prabowo (2019) mengkaji tentang bagaimana layanan *braille corner* khusus pengguna difabel dievaluasi untuk meningkatkan akses dan keterpakaian informasinya. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pengalaman aksesibilitas informasi pengguna difabel netra dalam memenuhi kebutuhan informasi mereka di perpustakaan umum.

Penelitian keempat berjudul “Designing for Diversity and Designing for Disability: New Opportunities for Libraries to Expand Their Support and Advocacy for People with Disabilities” (Jaeger, 2018). Metode penelitian yang digunakan Jaeger (2018) adalah tinjauan literatur. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengeksplorasi komitmen jangka panjang perpustakaan untuk mendukung dan mengadvokasi pengguna difabel melalui layanan yang aksesibel dan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpustakaan dapat memainkan peran penting

dalam mendukung dan mengadvokasi penyandang disabilitas, terutama dalam menghadapi banyaknya diskriminasi yang terjadi di masyarakat. Hal ini memberikan peluang bagi perpustakaan untuk menegaskan kembali komitmen mereka terhadap inklusivitas dan aksesibilitas.

Penelitian yang dilakukan Jaeger (2018) memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang aksesibilitas guna mendukung masyarakat difabel dalam memenuhi haknya. Perbedaan penelitian yang dilakukan Jaeger (2018) terdapat pada fokus kajian, dimana penelitian Jaeger (2018) mengkaji tentang bagaimana perpustakaan secara umum berkontribusi dalam mendukung pengguna difabel melalui inklusivitas dan aksesibilitas. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pengalaman aksesibilitas informasi pengguna difabel netra dalam memenuhi kebutuhan informasi mereka di perpustakaan umum.

Penelitian kelima berjudul “Accessibility and Inclusion Issues in Library Acquisitions: A Guideline to Evaluating and Marketing the Accessibility of Library E-Resources” (Falloon, 2016). Penelitian tersebut bertujuan untuk menekankan masalah aksesibilitas dan inklusi dalam perpustakaan perguruan tinggi di Amerika Serikat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendidik pustakawan akuisisi yang berupaya mengintegrasikan praktik terbaik dalam mengevaluasi aksesibilitas produk dan layanan yang diperoleh ke dalam alur kerja saat ini. Hasil penelitian ditemukan solusi alur kerja praktis seperti penggunaan LibGuides atau SubjectPlus untuk membantu perpustakaan dalam mengadaptasi praktik inklusif, serta memberikan layanan atau sumber daya informasi yang aksesibel bagi difabel.

Penelitian yang dilakukan Falloon (2016) memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu menekankan tentang permasalahan aksesibilitas informasi yang dialami pengguna difabel di perpustakaan. Perbedaan penelitian yang dilakukan Falloon (2016) terdapat pada fokus kajian, dimana penelitian Falloon (2016) mengkaji tentang bagaimana cara memastikan bahwa sumber daya digital (*e-resources*) dapat dievaluasi dan dilayankan dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan pengguna difabel agar memberikan aksesibilitas informasi di perpustakaan. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pengalaman aksesibilitas informasi pengguna difabel netra dalam memenuhi kebutuhan informasi mereka di perpustakaan umum.

Penelitian keenam berjudul “Public Libraries and the Social Inclusion of Homeless People: A Literature Review” (Forrest, 2022). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peran perpustakaan dalam menyediakan akses yang setara dan merata terhadap informasi dan layanan perpustakaan. Metode penelitian yang digunakan Forrest (2022) adalah metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur. Penelitian ini menunjukkan tren kemitraan antara perpustakaan umum dan lembaga dukungan profesional untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan lebih baik. Layanan yang relevan bagi tunawisma harus dikembangkan melalui konsultasi atau kolaborasi dengan kelompok sasaran ini untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan mereka, mengurangi atau menghilangkan hambatan terhadap kesetaraan akses, dan berkontribusi positif terhadap inklusi sosial.

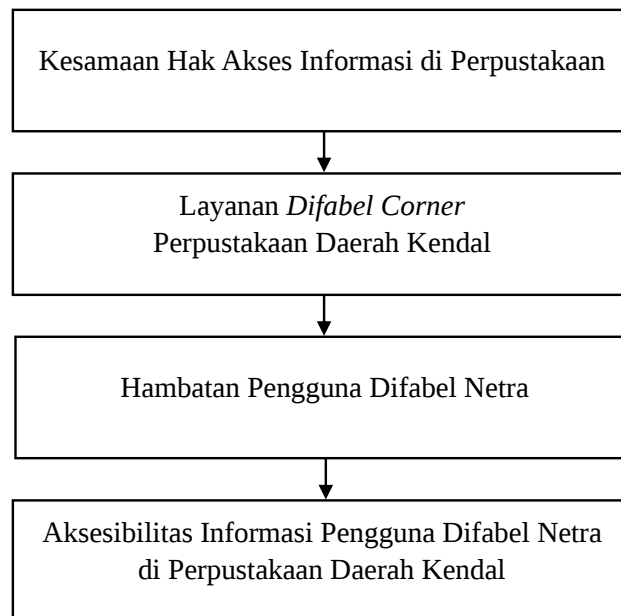
Penelitian yang dilakukan Forrest (2022) memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu mengkaji tentang akses, layanan, dan kesetaraan informasi yang diperoleh kelompok rentan di perpustakaan umum. Perbedaan penelitian yang dilakukan Forrest (2022) terdapat pada fokus kajian, dimana penelitian Forrest (2022) mengkaji tentang peran perpustakaan dalam memberikan pelayanan informasi yang setara kepada kelompok rentan yaitu tunawisma dan lansia. Adapun pada penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pengalaman aksesibilitas informasi yang diperoleh pengguna difabel netra dalam memenuhi kebutuhan informasi mereka di perpustakaan umum.

Berdasarkan keenam penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu memiliki persamaan pada topik penelitian yang diangkat yaitu menekankan masalah aksesibilitas informasi kelompok rentan yaitu pengguna difabel netra di perpustakaan umum. Pada keenam penelitian diatas berfokus menganalisis dan mengetahui peran perpustakaan dalam memberikan akses informasi serta meningkatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna difabel netra. Terdapat perbedaan yang cukup terlihat pada tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengalaman kemudahan akses informasi yang dirasakan dan diperoleh pengguna difabel netra di perpustakaan umum dalam memenuhi kebutuhan informasi mereka.

2.3 Kerangka Pikir

Adapun alur penelitian yang disusun dalam kerangka pikir, sebagai berikut:

Bagan 2.1 Kerangka Pikir



Perpustakaan merupakan lembaga publik yang memiliki peran penting dalam menyediakan akses informasi bagi semua kalangan masyarakat. Perpustakaan menjamin kesamaan hak atas informasi semua pengguna, termasuk penyandang disabilitas atau difabel. Komitmen tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 yang berbunyi masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. Perpustakaan Daerah Kendal merupakan salah satu perpustakaan yang memiliki komitmen dalam memberikan kemudahan hak dan akses atas informasi khususnya kepada difabel netra melalui *difabel corner*. Layanan tersebut

memberikan kemudahan akses informasi kepada pengguna difabel netra dengan menyediakan koleksi braille yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Faktanya kunjungan pengguna difabel netra dan keterpakaian informasi pada layanan difabel corner di Perpustakaan Daerah Kendal masih sangat rendah. Selain itu, akses kedalam gedung perpustakaan yang kurang ramah bagi difabel netra menyulitkan mereka secara mandiri untuk dapat mengeksplor setiap ruang yang ada di perpustakaan. Beberapa hal tersebut menjadi hambatan bagi pengguna difabel netra dalam mengakses informasi. Penting bagi Perpustakaan Daerah Kendal untuk menghapuskan diskriminasi atau hambatan yang menghalangi pengguna difabel mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan informasi. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk membahas bagaimana aksesibilitas informasi pengguna difabel netra di Perpustakaan Daerah Kendal. Nantinya, perpustakaan dapat merancang dan mengimplementasikan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan aksesibilitas informasi dan inklusivitas layanan bagi difabel netra.